

**JOKOWI MEMBANGUN SOLO:
STUDI KASUS ATAS GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA SOLO DALAM PROSES RELOKASI PEDAGANG KAKI
LIMA MONUMEN '45 BANJARSARI, SURAKARTA**

Dyah Ratri Ismi Hayuningtyas
Helly P. Soetjipto
Sri Respati Andamari

ABSTRACT

Implementation of relocation of street vendors (PKL) has now become the spotlight of public attention. Frequent clashes in various cities in Indonesia between government officials are generally represented by the Pramong Satuan Polisi Praja (Satpol PP) with street vendors. However, this did not happen in Solo, Central Java during the reign of Governor Joko Widodo in 2006. This study aims to find an answer to how Joko Widodo's leadership style (also known as Jokowi) as Mayor of Surakarta to approach the street vendors In Monument '45 Banjarsari Surakarta so they can move without risk or resistance effectively. To understand the concept of leadership style used in the relocation process done by Jokowi in Solo, the researcher conducted a qualitative analysis to develop typology and found five main interpretations of his leadership style from the point of view of street vendors. Leadership style is: populist, *sembodo* (consistent), *nguwongke* (appreciate), *ngemong* (care) and visionary. The results show that street vendors with a background in Solo need a psychological and cultural approach to conduct relocation without resistance.

Keywords: street vendors, relocation, leadership style, cultural influences

INTISARI

Pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini telah menjadi sorotan perhatian publik. Sering terjadi bentrokan di berbagai kota di Indonesia antara pejabat pemerintah yang umumnya diwakili oleh Pramong Satuan Polisi Praja (Satpol PP) dengan PKL. Meskipun demikian, hal ini tidak terjadi di Solo, Jawa Tengah pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo pada tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana gaya kepemimpinan Joko Widodo (juga dikenal sebagai Jokowi) sebagai Wali Kota Surakarta untuk melakukan pendekatan-pendekatan pada PKL di Monumen '45 Banjarsari Surakarta sehingga mereka dapat pindah tanpa resiko atau perlawanan secara efektif. Untuk memahami konsep gaya kepemimpinan yang digunakan dalam proses relokasi yang telah dilakukan oleh Jokowi di Solo, peneliti melakukan analisis kualitatif untuk mengembangkan tipologi dan menemukan lima interpretasi utama tentang gaya kepemimpinannya dari sudut pandang PKL. Gaya kepemimpinan tersebut adalah: rakyat, *sembodo* (konsisten), *nguwongke* (menghargai), *ngemong* (peduli) dan visioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL dengan latar belakang di Solo membutuhkan pendekatan psikologis dan budaya untuk mengadakan relokasi tanpa resistensi.

Kata kunci: PKL, relokasi, gaya kepemimpinan, pengaruh budaya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disingkat dengan PKL) semakin mendapat sorotan perhatian dari masyarakat luas. Di berbagai kota di Indonesia, kerap terjadi bentrok antara petugas pemerintah, umumnya direpresentasikan oleh Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) dengan para pedagang “gelap” itu. Tidak jarang, gesekan sosial memantik kerusuhan besar yang destruktif dan memakan korban material dan jiwa. Peristiwa ini terjadi di Ibukota Jakarta pada Juli 2005, PKL yang berdagang di trotoar depan Pasar Minggu bentrok dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Dalam kerusuhan kali ini jatuh korban luka baik dari sisi petugas maupun PKL. Hal ini diakibatkan karena pengusuran yang dilakukan tidak memberikan keterangan tentang lokasi berdagang yang baru, walaupun sebenarnya pedagang sudah diberikan surat peringatan sebelumnya (Sutomo, 2005).

Pada bulan Desember 2006 di Bogor, peristiwa ini juga terjadi di Gunung Putri, Bogor. PKL tidak rela lapak dagangannya dibongkar sehingga PKL mengamuk dan mengusir petugas Satuan Polisi. PKL bersikeras untuk bertahan karena merasa sudah membayar uang pungutan sebesar dua juta rupiah kepada petugas Satuan Polisi di kecamatan untuk setiap lapak. Peristiwa kisruh relokasi PKL juga pernah terjadi di Lumajang pada tahun 2009. Para pedagang melakukan perlawanan terhadap para petugas yang bermaksud untuk menggusur lapak PKL. Hal lain yang semakin memicu emosi PKL adalah adanya sekelompok orang berpakaian preman yang turut membawa dan mengangkut lapak ke sebuah truk. PKL berpikiran bahwa pemerintah daerah menggunakan jasa preman untuk mengatasi perlawanan PKL

Risiko dari perpindahan lokasi penjualan merupakan tekanan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru beserta hal-hal yang akan dihadapi seperti memulai berdagang dari nol. Perubahan dari perpindahan lokasi tersebut mengakibatkan ketakutan pedagang akan kemungkinan pendapatan yang menurun, persaingan dengan pedagang lain di tempat baru, serta ketidaknyamanan yang dirasakan ketika menempati tempat baru. Selain itu, ketidaknyamanan yang ditakutkan akan dialami oleh pedagang pada proses pemindahan lokasi ini juga memberikan rasa cemas. Rasa cemas dan takut yang dirasakan oleh pedagang ini membuat PKL cenderung bersikap keras dan tidak bersedia menerima pemindahan lokasi tersebut.

Fosterharoldas (2004) dalam studi menyebutkan bahwa tumbuhnya PKL sangat mempengaruhi tata kota dan area publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Hal inilah yang mendorong relokasi untuk dilakukan, namun adanya relokasi terkadang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman dan hanya berkesan ‘pengusiran’ PKL dari daerah yang bermasalah. Alhasil setelah relokasi dilakukan, rasa kurang puas atas perlakuan dari pemerintah kota mendorong PKL untuk menetap dan resisten terhadap program relokasi.

Namun sebaliknya, fenomena ini tidak terjadi pada relokasi PKL di Monumen ‘45 Banjarsari di Surakarta. Pada tahun 2005, di awal pemerintahan Walikota yang baru yaitu Joko Widodo (selanjutnya disingkat dengan Jokowi) menyebarkan survey kepada seluruh masyarakat Solo untuk kemajuan Solo kedepan apa yang diinginkan. Hal ini berujung pada hasil dimana masyarakat menginginkan perbaikan infrastruktur serta penataan PKL di sekitar daerah aktivitas publik. Pada saat itu, Monumen ‘45 Banjarsari merupakan kawasan dimana PKL berkumpul dan melakukan kegiatan jual beli di wilayah bersejarah. PKL sudah ada di Monumen ‘45 Banjarsari sejak tahun 1997 dan menjual barang-barang bekas (klithikan) (Lihat gambar 1, lampiran hal.193). Jumlah PKL yang semakin meningkat dikarenakan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998. Solo sebagai kota tujuan para pencari kerja menjadi lokasi

penumpukan PKL. Hal ini juga diiringi dengan kebijakan pemerintahan yang tidak tegas sehingga PKL semakin mengotori Monumen '45 Banjarsari (Ariyadi, Adishakti, & Kristiadi, 2005). Dari lokasi yang memang tidak seharusnya ditempati menjadi penuh sesak dengan PKL memicu permasalahan baik dari warga lingkungan sekitar maupun dari PKL sendiri. Penggunaan daerah sekitar Monumen '45 Banjarsari yang seharusnya bisa menjadi taman kota, tidak dapat terealisasi karena fungsi yang berubah menjadi pasar klithikan. Selain itu, masyarakat sekitar Monumen '45 Banjarsari juga harus menanggung risiko dimana halaman dan daerah sekitar rumahnya menjadi kotor karena sampah (Lihat gambar 2, lampiran hal.193). Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota bertekad untuk merelokasi PKL ke daerah Semanggi.

Relokasi PKL Banjarsari memperlihatkan bagaimana pendekatan yang dilakukan Jokowi sebagai pemimpin daerah memiliki peran penting dalam meredam potensi gesekan sosial antara PKL dan petugas pemerintah. Nur (2011) menyebutkan dalam studinya tentang komunikasi politik yang dilakukan Jokowi, merupakan pemahaman akan proses memanusiakan manusia. Kebijakan sebagai pemimpin yang dilakukan merupakan kebijakan yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemimpin adalah seseorang yang dijadikan acuan bagi masyarakat, bagaimana pemimpin mampu memberikan kebijakan dan bersikap akan sangat mempengaruhi respon dari masyarakat. Pemahaman terhadap apa yang akan dihadapi oleh PKL harus dipahami oleh pemimpin daerah sebelum melakukan relokasi. Pemberian bantuan yang tepat juga harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh PKL hingga akhirnya mereka direlokasi. Resistensi terhadap relokasi ini dapat berkurang saat kebutuhan dan pendekatan yang diberikan oleh pemimpin daerah, mampu memenuhi keinginan PKL baik secara fisik maupun psikologis.

B. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari pemahaman di atas, penelitian ini dilakukan dengan landasan untuk memahami bagaimana pendekatan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Jokowi sebagai pemimpin. Aspek-aspek yang dirasakan oleh PKL saat direlokasi akan memberikan segmen kognitif tertentu yang mengarah kepada bentuk gaya kepemimpinan yang dirasa tepat oleh PKL dan masyarakat Solo pada umumnya. Bagaimana pendekatan Jokowi sehingga PKL bersedia pindah ke Pasar Klithikan Notoharjo menjadi hal yang akan dikupas oleh peneliti untuk menjadi bahan tinjauan gaya kepemimpinan di kemudian hari.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola gaya kepemimpinan pada kasus relokasi PKL yang dilakukan di Monumen '45 Banjarsari oleh Jokowi sehingga mampu melakukan relokasi dengan efektif tanpa resistensi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

- Mengidentifikasi aspek-aspek gaya kepemimpinan yang dimiliki Jokowi dalam melakukan relokasi PKL di Monumen '45 Banjarsari
- Mengidentifikasi proses pelaksanaan relokasi PKL dari Monumen '45 Banjarsari menuju Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi
- Memberikan sumbangsih kepada ilmu Psikologi dan Psikologi Industri dan Organisasi pada khususnya mengenai tipikal gaya kepemimpinan yang digunakan pada proses relokasi dan perlakuan kepada masyarakat kelas bawah.

- Memberikan fokus bentuk gaya kepemimpinan yang diidealkan oleh masyarakat dengan tipikal budaya seperti masyarakat di Solo, Jawa Tengah
 - Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi pemimpin daerah dalam proses program perencanaan relokasi di daerahnya masing-masing.
- b. Manfaat Secara Praktis
- Penelitian ini nantinya akan memberikan konsep gaya kepemimpinan yang dilihat dari sisi masyarakat kelas bawah yang dikaitkan dengan proses relokasi sehingga masyarakat mau melakukan relokasi tanpa resistensi. Hal ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi pemimpin daerah lain dalam melihat sisi gaya kepemimpinan, komunikasi yang dilakukan, serta situasi lapangan yang dihadapi untuk program relokasi di daerah lain.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gaya Kepemimpinan

Definisi kepemimpinan banyak diberikan oleh pakar untuk menjelaskan konsep yang berkaitan sebagai latar belakangnya. Kepemimpinan di definisikan oleh Yukl (2002) sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi orang lain agar mampu berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan keberhasilan tujuan kelompok. Hal ini juga senada dengan Robbins (2007) yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk meraih sebuah tujuan. Sikap seorang pemimpin diantaranya adalah memiliki ambisi, memiliki keinginan untuk memimpin, jujur dan memiliki integritas, memiliki kepercayaan diri, mampu mawas diri, memiliki inteligensi yang baik, dan pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sedang menurut Riggio (2003) kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengarahkan sebuah kelompok untuk melakukan pencapaian prestasi pada tujuan mereka. Yukl dan Van Fleet dalam Riggio (2003) mengatakan bahwa definisi kepemimpinan sangat banyak, akan tetapi keseluruhan definisi ini melingkupi tentang bagaimana seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan kelompok dalam meraih tujuan. Masyarakat menjadi objek yang dikenakan perlakuan atas kebijakan yang diputuskan oleh pemimpin daerah. Hal ini berarti pengaruh dari pemimpin daerah terhadap masyarakat dan lingkungannya cukup besar.

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku seseorang yang diperlihatkan saat mempengaruhi aktivitas orang lain seperti yang dipersepsikan orang lain. Gaya kepemimpinan terdiri atas kombinasi dari perilaku terhadap tugas dan hubungan ketika perilaku terhadap tugas didefinisikan sebagai upaya seorang pemimpin daerah untuk mengorganisir serta menjelaskan aktivitas masyarakat, menetapkan pola kebijakan komunitas dan melakukan penyelesaian permasalahan dalam masyarakat secara rinci dan jelas. Perilaku terhadap hubungan didefinisikan sebagai upaya pemimpin daerah untuk membina hubungan diantara anggota masyarakat dan menjalin komunikasi untuk mendapatkan esensi dari dukungan sosio-emosional serta kemudahan dalam mencapai perubahan perilaku pada anggota (Hersey & Blanchard, 2000). Mendukung definisi gaya kepemimpinan dari Hersey dan Blanchard, Thoha (2008) mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan adalah norma maupun nilai perilaku yang digunakan seseorang mencoba mempengaruhi perilaku orang lain.

Gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi tiga (Timpe, 1991), yaitu :

a. Otokratis

Ciri pemimpin yang otokratis selalu membuat keputusannya sendiri karena kekuatan terpusat pada satu orang saja. Komunikasi yang dilakukan bersifat dari atas ke bawah dan satu arah.

b. Demokratis

Ciri pemimpin yang demokratis memiliki pemikiran jangka panjang dan selalu mengaitkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang dilakukan oleh tipikal pemimpin ini bersifat dua arah sehingga saran dan kritik bersifat konstruktif.

c. Kendali Bebas

Ciri pemimpin dengan kendali bebas adalah pemimpin yang memberikan kekuasaan maupun pengambilan keputusan kepada masyarakat umum untuk mengembangkan solusi dari permasalahan dengan sedikit arahan dari pemimpin.

Gaya kepemimpinan akan tampak dari awal saat seorang pemimpin daerah memiliki pemahaman akan motivasinya, dan tentu saja interpersonal dalam dirinya. Disebutkan dalam Steinberg (2005) bahwa jenis kepemimpinan yang teraplikasi merupakan hasil kepribadian seseorang. Kepribadian yang dimiliki seorang pemimpin daerah akan membentuknya menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan lingkungan ia tumbuh, ia akan memahami masyarakat dan cara penyelesaian konflik juga berdasarkan ia tumbuh berkembang dan kepribadian ini yang akan menjadi senjatanya dalam berhubungan dengan orang lain. Gaya kepemimpinan saat pemimpin daerah memiliki aktivitas dengan kabinet dan jajarannya merupakan sebuah bentuk kepatuhan akan birokrasi dan pengaturan diri yang tepat sehingga ia mampu mengatur regulasi dan memberikan kebijakan yang tepat kepada organisasi. Untuk gaya kepemimpinan dengan aktivitas yang diutamakan pada anggota masyarakat merupakan hubungan yang mementingkan komunikasi untuk penyampaian visi dan misi dari pemimpin daerah serta tujuan program dari pemerintah secara umum, sehingga pada akhirnya anggota masyarakat akan memberikan keterbukaan dan kepatuhan yang mengarah kepada tujuan program pemerintah yang telah direncanakan sejak semula.

Berangkat dari pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai bentuk gaya kepemimpinan, Kearsley dan Lynch dalam Drucker (2007) mengemukakan adanya empat faktor utama dalam gaya kepemimpinan yaitu :

1. Situasi, merupakan sebuah kondisi seorang pemimpin harus memperlihatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Pemimpin menghadapi kondisi dengan pemikiran yang siap mengenai apa dan bagaimana yang akan pemimpin lakukan untuk tetap mencapai tujuan organisasi. Hal yang dimaksudkan adalah seperti jenis pekerjaan, tekanan tugas, waktu, ancaman yang datang dan pengaruh lingkungan eksternal.
2. Anggota, merupakan tingkat kematangan yang dimiliki oleh anggota, nilai-nilai yang dianutnya, bentuk budaya organisasi, serta harapan yang dimiliki anggota organisasi untuk mencapai kepuasan dalam tujuan organisasi.
3. Komunikasi, merupakan cara yang digunakan pemimpin untuk memberikan gambaran seluas-luasnya tentang apa yang menjadi tujuan akhir organisasi kepada bawahannya.
4. Kepemimpinan sendiri merupakan cara memimpin seperti apa yang dipilih oleh pemimpin yang disesuaikan dengan jati diri dan makna tujuan organisasi. Hal ini nantinya akan menggambarkan bagaimana pemimpin mengatur hubungan antara atasan dan bawahan, persepsi dan sikap yang dimilikinya, caranya memberikan arahan, serta caranya memberikan dukungan sosioemosional kepada anggotanya.

Kultur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan (Schein, 2004). Perkembangan ilmu dengan poros sudut pandang barat saat ini memberikan dinamika yang aktif bagi fokus ilmu yang berbasis budaya lokal. House, Wright & Aditya (1997) mengartikan kultur sebagai beberapa hal yang secara otomatis terproses, penyebaran cara berpikir, merasakan dan bereaksi, serta pembentukan jati diri dan komunitas. Kultur sering dikaitkan dengan sejarah, bahasa, dan agama dari anggota masyarakat. Peter & Kabacoff (2010) menyebutkan dalam studinya bahwa budaya di Eropa sangat mempengaruhi gaya

kepemimpinan, cara pendekatan pemimpin kepada masyarakatnya, serta motivasi yang diberikan. Interaksi budaya dalam proses kepemimpinan memiliki arahan untuk dapat memahami satu pendapat yang berbeda dengan pendapat lainnya. Seiring dengan hasil penelitian tersebut, Zagoršek (2004) menerangkan hasil studinya dimana kultur memiliki dampak signifikan terhadap praktek kepemimpinan meskipun dipengaruhi efek demografi lain seperti usia dan jenis kelamin. Hal ini juga semakin diperkuat oleh House, Wright & Aditya (1997) dengan penelitian empirisnya yang memperlihatkan adanya pengaruh kultur pada aspek kepemimpinan. Studi ini juga menjelaskan bahwa perubahan sosial dibawah kepemimpinan akan lebih mudah dilakukan dengan pendekatan yang mengacu kepada nilai kultural dan religi setempat. Untuk memahami konteks kepemimpinan yang berasal dari budaya setempat, tentunya akan lebih baik jika dikembangkan dengan teori yang bersifat kearifan lokal.

Studi kasus relokasi PKL ini tidak dapat dilakukan jika pada akhirnya seorang pemimpin daerah hanya melakukan misi untuk merelokasi. Sebaliknya hal yang terjadi adalah komando langsung kepada Satuan Polisi PP untuk langsung melakukan relokasi tanpa adanya negosiasi ataupun hubungan langsung antara pemimpin daerah dan masyarakatnya. Kepemimpinan yang mengutamakan hubungan akan menggunakan komunikasi sebagai cara pendekatan yang alami, sehingga kericuhan tidak terjadi. Sayangnya proses ini jarang terjadi di kota-kota besar di Indonesia dimana para pemimpin kurang sering turun ke lapangan dan memberikan komando kepada bawahannya saja, sehingga berkesan pemimpin cukup “cuci tangan” dan hal inilah yang mengecewakan masyarakatnya. Hal yang berkebalikan terjadi di Solo merupakan contoh kasus kepemimpinan yang mengoptimalkan komunikasi dan partisipasi dari masyarakatnya sendiri.

B. Pedagang Kaki Lima dan Relokasi

Keirt Hart dalam Sinaga (2004) melakukan klasifikasi pada jenis pekerja, yaitu: (a) Kelompok pekerja formal, (b) Kelompok pekerja informal, dan (c) kelompok pekerja tidak sah. Pengelompokan ini dilakukan Keirt hart berdasarkan kegiatan yang dilakukan pekerja, jumlah penghasilan, keteraturan cara kerja, hubungan pekerja dengan perusahaan, waktu yang dilakukan selama bekerja dan status hukum pada pekerjaan yang pekerja lakukan. Menurut Perda 5 tahun 1978 dalam Sinaga (2004) sektor informal diartikan sebagai :

“... Mereka yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya”.

Pengertian inilah yang akhirnya jadikan batasan definisi dari PKL di negara berkembang dimana PKL menggunakan ruang publik sebagai bagian dari tempat PKL mengembangkan usahanya. Perda Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan PKL adalah setiap orang yang melakukan usaha dagang maupun jasa di tanah milik negara. PKL banyak ditemukan di ruang terbuka di lokasi ramai seperti di pasar, tepi jalan umum dan lain-lain. PKL merupakan salah satu sector informal yang dimiliki negara, akan tetapi banyaknya PKL ini juga linier dengan adanya peningkatan jumlah pengangguran yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Lokasi PKL seperti munculnya pasar tradisional dimana tanpa mengenal tempat maupun adat, mereka langsung menempati lokasi yang ramai dan banyak diketahui pembeli sehingga lama kelamaan lokasi dipenuhi PKL dan menjadi sentra jual-beli di masyarakat (Sinaga, 2004).

PKL merupakan komunitas yang terbentuk karena adanya tekanan situasi dimana mata pencaharian sulit dicapai. Studi kasus ini mengemukakan konsep perkotaan yang menjadi tempat hijrah masyarakat dari desa merupakan lahan yang luas untuk dijadikan lapak

perdagangan PKL dimana pekerjaan sulit diraih dan PKL lebih mudah memasarkan dagangannya karena ruang publik dan konsumen yang jelas banyak di daerah perkotaan. Penumpukan masyarakat yang berasal dari proses urbanisasi dan PHK yang terjadi karena krisis membuat pertahanan dalam hidup mereka dengan menjadi PKL. Hal ini yang akhirnya menjadi momok tersendiri bagi kebijakan pemerintah akan pembukaan lahan pekerjaan yang juga disandingkan dengan kebutuhan akan tata kota yang lebih baik.

Relokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *re-lo-ka-si /rélokasi/ n* pemindahan tempat dan *me-re-lo-ka-si v* memindahkan tempat (Depdiknas, 2008). Sinaga (2004) menjelaskan relokasi sebagai usaha pemindahan PKL yang awalnya membuka lapak di ruang publik seperti taman kota, trotoar, pedestrian, jembatan, atau tempat yang sekiranya akan mengganggu tata tertib tata kota akan dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RUTR) Kota. Tujuan dari diterapkannya relokasi adalah untuk menata pengembangan usaha sektor informal ke arah yang semi-formal melalui pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Febrilianawati (2010) juga menyatakan bahwa relokasi merupakan sebuah usaha untuk memindahkan suatu obyek ke tempat yang lain yang lebih baik dikarenakan alasan-alasan tertentu. Sebaliknya, relokasi PKL merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rancangannya untuk penataan kota yang lebih baik, lebih bersih dan pengelolaan sumber daya manusia di kota tersebut. Seorang individu maupun komunitas masyarakat mampu membentuk suatu pemikiran tentang sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi suatu kondisi. Penggusuran yang terjadi merupakan hasil dari peraturan daerah yang tidak dipatuhi sehingga membutuhkan relokasi yang tepat. Akan tetapi, karena resistensi yang dilakukan oleh PKL, hal ini menyebabkan adanya penggusuran yang ricuh dan memberikan kerugian. Besar kemungkinan dikarenakan pengawasan yang kurang dan tindakan preventif yang minim. Kasus penggusuran yang berakhir ricuh seperti di kota Jakarta, Medan, Samarinda dan kota-kota lain menjadikan pertanyaan, bagaimana kota Solo bisa melakukan relokasi tanpa terjadi adanya gesekan sosial? Dasar tipikal gaya kepemimpinan yang menjadi kekuatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakatnya merupakan hal yang dijadikan sorotan.

C. Gaya Kepemimpinan dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima

Proses relokasi PKL yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia menjadi suatu ironi pemerintahan dalam melakukan tata kota. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategi pendekatan yang kompeten agar relokasi berjalan aman dan tertib. Berbagai perencanaan dan strategi pendekatan yang diimplementasikan akan memberikan gambaran bagaimana seorang pemimpin memiliki cara tersendiri untuk mendukung setiap lapisan masyarakat dalam melakukan relokasi, tidak terkecuali PKL. Keberadaan pemimpin yang menggunakan berbagai strategi pendekatan khusus akan memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan yang ia lakukan, terutama dalam memimpin daerahnya. Pengaruh dari situasi seperti kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana, pemahaman relokasi pada PKL, serta kultur yang mewarnai daerah tersebut akan memberikan warna tersendiri dalam bentuk gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Patton dalam Poerwandari (2007) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian interpretative terhadap suatu gejala, meneliti secara alamiah apa adanya, menggunakan analisis data secara logika induktif, kontak personal secara langsung dilapangan, memahami secara keseluruhan dan dinamis, berorientasi pada kasus unik, memiliki desain yang dibuat

mengenai masalah tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian dengan data-data empiris untuk menginvestigasikan fenomena kontemporer dengan konteks nyata yang ada. Poerwandari (2007) menyebutkan bahwa studi kasus merupakan studi dari sebuah fenomena yang muncul dari konteks yang dibatasi (*bounded context*), pun hal ini terkadang batasan fenomena dan konteksnya tidak sepenuhnya jelas. Kasus yang diangkat bisa beragam baik secara individual maupun komunitas. Stake dalam Sarantakos (2008) menyebutkan ada tiga tipe studi kasus, yaitu : (a) studi kasus intrinsik, penelitian yang dilakukan karena ketertarikan khusus pada satu kasus tanpa ada upaya untuk menggeneralisasi, (b) studi kasus instrumental, penelitian yang dilakukan pada satu kasus unik tertentu untuk memahami isu serta memiliki hasil yang dapat diaplikasikan lebih luas, (c) studi kasus kolektif, penelitian yang dilakukan dengan mencakup beberapa kasus untuk mempelajari fenomena umum dengan lebih mendalam (Poerwandari, 2007; Sarantakos, 2008).

B. Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana subjek mendeskripsikan pendekatan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Walikota Solo, Jokowi, dalam merelokasi komunitas PKL di kawasan Monumen '45 Banjarsari pada tahun 2005-2006.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang didasarkan dari metode sampel non-probabilitas, yaitu *snowball sampling*. Pengambilan subjek penelitian ini dilakukan dari pemilihan beberapa subjek oleh peneliti, kemudian bertanya kepada subjek yang telah terpilih untuk merekomendasikan subjek lainnya yang memenuhi kriteria dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini (Sarantakos, 2008). Pemilihan subjek yang didasarkan dengan sebuah konteks yang berhubungan dengan penelitian diharapkan dapat memperkecil kemungkinan perluasan pembahasan penelitian (Lawrence, 2007). Oleh karena itu, dalam penelitian ini diambil subjek yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki pekerjaan sebagai PKL yang saat ini masih memiliki kios di Pasar Klithikan Notoharjo
- b. Merupakan PKL di Monumen '45 Banjarsari sebelum tahun 2006
- c. Mengalami proses relokasi PKL pada tahun 2006 dari Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

D. Metode Pengumpulan Data

Palys dalam Poerwandari (2007) mengatakan adanya proses pengambilan data dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu metode kontak langsung (wawancara, diskusi, penggunaan alat-alat proyeksi), metode observasional, serta metode *unobstrusive* dan arsip melalui hasil karya, dan bentuk peninggalan lain. Observasi menurut Patton dalam Poerwandari (2007) merupakan metode pengumpulan data yang esensial dalam penelitian kualitatif. Sedangkan observasi dilakukan dengan persiapan yang teliti dan lengkap sehingga dapat memberikan data yang akurat dan bermanfaat. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk memperlihatkan deskripsi utuh dari lingkungan yang menjadi fokus penelitian.

Wawancara merupakan metode yang dilakukan melalui proses tanya jawab serta percakapan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pengambilan data ini digunakan untuk memperoleh informasi dari makna responden yang berkaitan dengan isu tersebut (Banister dkk., 1994; Poerwandari, 2007). Jenis wawancara yang digunakan seperti : (1) wawancara informal, (2) wawancara dengan pedoman umum, (3) wawancara dengan pedoman

terstandar yang terbuka, dan (4) wawancara mendalam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam yang digunakan dengan tujuan untuk mengungkap data lebih mendalam dan secara personal/sensitif. Dari hasil wawancara akan dibuat transkrip secara verbatim (kata demi kata). Hal ini dimaksudkan agar peneliti dan memperhatikan hasil penelitian secara praktis dalam wawancara yang dilakukan (Patton, 1990; Poerwandari, 2007; Denzin dan Lincoln, 2011). Rancangan wawancara dalam penelitian ini dibuat dalam konsep semi-terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun, namun tidak dengan pertanyaan berikutnya sehingga bentuk pertanyaan nantinya tidak akan menjadi kaku (Lawrence, 2007).

E. Verifikasi dan Validitas

Validitas data lapangan dapat dilihat melalui metode triangulasi. Patton dalam Poerwandari (2007) menyebutkan bahwa triangulasi terdiri atas triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, triangulasi metode serta triangulasi perspektif. Penelitian ini nantinya akan menggunakan triangulasi waktu untuk melihat validitas dari data yang diperoleh berkaitan dengan fokus penelitian. Triangulasi waktu adalah metode yang digunakan untuk penelitian dengan waktu yang berbeda. Triangulasi ini dapat digunakan dengan triangulasi yang lain secara konsekutif (Sarantakos, 2008). Triangulasi waktu akan dilakukan dengan melakukan pengulangan pertanyaan yang sama kepada subjek yang sama pula namun melalui waktu yang berbeda. Hal ini akan menciptakan dinamika kejenuhan jawaban dari subjek dan memastikan adanya stabilitas dalam jawaban subjek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Subjek

Peneliti melakukan proses pengambilan data melalui observasi dan wawancara pada beberapa subjek untuk melakukan *preliminary study*. Subjek penelitian terdiri atas 3 orang responden. Ketiganya bekerja sebagai PKL baik sebelum dan sesudah di relokasi.

Tabel 1
Subjek Penelitian

	Jenis Kelamin	Umur
Subjek 1	Perempuan	42 Tahun
Subjek 2	Laki – laki	39 Tahun
Subjek 3	Laki - laki	45 Tahun

2. Hasil Analisis Wawancara

Penjelasan secara naratif tentang data penelitian yang didapatkan melalui subjek diatas dikembangkan oleh peneliti dalam tahap selanjutnya yaitu analisis. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kategori keseluruhan secara mendasar, mencari hubungan antar kategori dan memvalidasi hubungan yang ada dari kategori-kategori tersebut.

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pola gaya kepemimpinan Jokowi dalam proses relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari dan mengapa PKL bersedia direlokasi, sub bab ini akan menjelaskan secara bertahap mengenai temuan peneliti serta pembahasannya. Dari data yang telah diseleksi, peneliti menemukan lima tipikal gaya kepemimpinan Jokowi berdasarkan subjek, yaitu : pemimpin yang merakyat, pemimpin yang *nguwongke*, pemimpin yang *sembodo*, pemimpin yang *ngemong*, serta pemimpin yang

visioner. Temuan ini nantinya akan dibahas secara teoritik dan ditarik dari sudut pandang kultural di sub bab selanjutnya hingga membentuk sebuah pola gaya kepemimpinan yang menjawab pertanyaan penelitian.

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi gaya kepemimpinan Jokowi sebagaimana yang dideskripsikan oleh subjek. Dari analisis tersebut, didapatkan beberapa sifat kepemimpinan Jokowi sebagaimana dipaparkan sebagai berikut :

1. Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat

Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat. Anggapan ini diungkapkan oleh subjek oleh diungkapkan oleh subjek dikarenakan Jokowi mampu membaaur dengan rakyatnya. Jokowi tidak membedakan diri dengan warga masyarakatnya karena dia seorang Walikota, ia mau berkenalan dengan warga dan kontak langsung dengan warga. Dalam proses relokasi, hal ini yang menjadi titik temu antara seorang Walikota dan warganya. Ia menjadikan proses ini sebagai pendekatan awal pada PKL Monumen '45 Banjarsari sehingga PKL lebih mudah menerima informasi yang akan diberikan oleh Jokowi dan Pemerintah Kota. Dengan mengenal satu persatu PKL yang ada di Monumen '45 Banjarsari, Jokowi mendapatkan kesempatan untuk mendalami pengalaman masing-masing PKL dan memahami keinginan mereka satu persatu. Salah satu yang disebutkan subjek adalah sebagai berikut :

"..., kepemimpinannya itu tadi mbak, merakyat, cara memimpin yang merakyat, membaaur sama rakyatnya." (W1.S2, 304-305)

"..., ya namanya merakyat, orang mau kenal sama rakyat, mau makan sama rakyat, jarang to? Langsung dengan rakyat, nah kan lama-lama kan jadi percaya, kemudian kan ada pembuktian-pembuktian" (W2.S2, 124-126)

Beberapa kali PKL Monumen '45 Banjarsari menemui Walikota nya tanpa kawalan. Mereka merasa bahwa walikotanya juga merupakan orang biasa dan tidak diistimewakan. eksistensi Jokowi yang terkadang tidak disadari oleh masyarakatnya memberikan kesan bahwa ia sama dengan rakyatnya. Kesan bahwa Jokowi adalah 'orang biasa' membuat PKL mampu mengungkapkan apa saja dan tidak merasa sungkan dengan pemimpinnya. Sebagai pemimpin Jokowi mampu menempatkan dirinya diantara masyarakatnya sendiri. Kedekatan masyarakat dengan pemimpin mampu dirasakan oleh PKL karena Jokowi melakukan komunikasi langsung dengan warganya. Hal ini memberikan kedekatan dan keterbukaan dari PKL kepada Walikotanya. Dengan adanya Walikota yang menempatkan diri sama seperti PKL, lebih mudah untuk PKL menyampaikan hal-hal krusial mengenai relokasi. Selain itu, kedekatan Walikota dengan PKL membuat PKL merasa senang dan diakui.

2. Jokowi sebagai pemimpin yang *nguwongke*

Hal yang membuat PKL rela direlokasi tanpa melakukan penolakan adalah salah satu sikap Jokowi yang *nguwongke*, yaitu sikap yang menghargai PKL sebagai sesama masyarakat, dan tidak menganggap bahwa ia lebih tinggi dari PKL sebagai Walikota. Subjek mengatakan bahwa kemudahan akses warga masyarakat untuk mengakses Jokowi sebagai walikota sangat mudah. Warga dapat langsung menuju balai kota dan mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Keberadaan pemimpin yang mudah

diakses ini memberikan kesan pada masyarakat bahwa Jokowi sebagai Walikota tidak meninggikan keberadaannya. Jokowi mampu menghargai setiap anggota masyarakatnya untuk menjadi koreksi dalam diri sebagai pemimpin dalam proses penataan kota. Dalam kasus relokasi PKL, Jokowi sebagai pemimpin mampu *nguwongke* PKL sehingga mereka mau direlokasi. Salah satu subjek mengatakan bahwa *nguwongke* yang ia maksud contohnya adalah apabila Jokowi menghargai PKL, maka secara otomatis, juga PKL akan menghargai PKL dan akan menuruti apa yang diminta oleh Jokowi. Berikut pernyataan subjek mengenai hal tersebut:

“Maksude kan, menghargai jadi artinya menghargai orang, jadi misalnya mbak kesini saya menghargai, otomatis mbak akan menghargai saya, akan mau apa yang saya, saya inginkan mesti mbake mau, mestinya kan gitu, nguwongke uwong.” (W1.S3, 374-375)

Dalam kasus relokasi PKL Monumen '45 Banjarsari, pendekatan Jokowi dalam relokasi yang bersifat *nguwongke* merupakan salah satu indikator yang membuat PKL mampu direlokasi tanpa adanya resistensi. Subjek menganggap bahwa Jokowi yang *nguwongke* adalah pemimpin yang memiliki banyak pengaruh kepada masyarakatnya. PKL yang merasa *di-uwong-ke* atau dihargai, permintaannya dipenuhi oleh Jokowi, sehingga PKL tidak melakukan demo maupun penolakan. Keseimbangan antara hubungan dan pemenuhan kebutuhan yang sesuai menjadi dasar tujuan pendekatan *nguwongke* ini. Hal ini juga diungkapkan oleh subjek :

3. Jokowi sebagai pemimpin yang *sembodo*

Proses sebelum relokasi yang melalui beberapa tahap membuat subjek merasa bahwa Jokowi adalah pemimpin *sembodo* atau konsekuen. Jokowi konsekuen dengan apa yang dikatakannya, seperti menepati janji untuk mengabulkan persyaratan yang diajukan oleh PKL dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan PKL. Sebagai pemimpin, Jokowi mampu menepati janji. Resiko akan resistensi dapat berkurang karena Jokowi memberikan fasilitas yang sesuai dengan yang diajukan oleh PKL. Jokowi dinilai tidak hanya bicara saja, tetapi juga merealisasikan apa yang Jokowi katakan. Dalam proses relokasi Jokowi mampu menempatkan PKL di lokasi yang sesuai dengan apa yang Jokowi sampaikan sebelumnya. Dari pendekatan awal yang mampu membuka jarak antara Walikota dan PKL, PKL mampu mengungkapkan apa yang mereka butuhkan untuk kesediaannya direlokasi. Setelah direlokasi hal yang diminta sudah disediakan, hal ini membuat PKL merasa bahwa mereka direlokasi dengan tidak sia-sia karena sudah disediakan tempat baru. Keberhasilan Jokowi menepati janji kepada PKL memberikan rasa percaya rakyat kepada pemimpinnya.

“Beliau konsekuen pada isi pembicaraan, jadi, piye ya, Jer Basuki Mawa Bea, ‘aku ngakon kowe pindah ning aku yo menempatkanmu ke tempat yang selayaknya’, dan janji itu ditepati sama beliau, seperti itu, makanya tidak terjadi gesekan.” (W1.S1, 193)

“Dia punya komitmen, tapi dia kan punya rencana to kalo misal memang nggak bisa dijalankan. Dia itu bisa dipercaya, tauladan, bisa dijadikan contoh, ...” (W2.S3, 241-251)

Sikap *sembodo* yang dilakukan oleh Walikota Jokowi diwujudkan dalam perilaku yang menepati janji, merealisasikannya, dan menjaga komitmen dalam penentuan kebijakan. Janji yang diutarakan kepada PKL mengenai lokasi, modal, kios, akses jalan, serta surat dagang mampu direalisasikan sehingga PKL mau untuk direlokasi tanpa resistensi.

4. Jokowi sebagai pemimpin yang *ngemong*

PKL menilai Jokowi sebagai pemimpin yang *ngemong*. Melalui pendekatan ini, Jokowi dinilai mampu memberikan perhatian yang penuh kepada PKL dalam proses relokasi. Sentuhan perhatian dan pendekatan sebelumnya kepada rakyat kecil membuat Jokowi diakui keberadaannya tidak hanya sebagai Walikota tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Penerimaan atas keberadaan Jokowi ini dapat dinilai saat ia mampu memberikan pemahaman mengenai relokasi kepada PKL. Berikut salah satu pernyataan subjek :

“Ya, awalnya bingung mbak, tapi karna saking pinternya beliau, ngemong hatinya rakyat, saking pinternya beliau ngemong hatinya rakyat kecil. Ya ngasih pemahaman. ngasih suatu pemahaman dalam arti, ini tidak selayaknya ditempat,...” (W1.S1, 236-247)

Konsep *ngemong* ini terealisasi oleh pemimpin yang perhatian, mengayomi, serta melindungi rakyatnya. Dalam kasus ini, Jokowi sebagai pemimpin dinilai oleh subjek mampu mengiringi setiap proses relokasi dengan baik. Pendekatan yang Jokowi berikan kepada PKL berkaitan dengan motivasi dan secara kekeluargaan sehingga PKL merasa diperhatikan. Tidak hanya itu saja, Jokowi juga memberikan pendekatan secara sosial dan budaya. Hal ini tampak dari cara berinteraksi yang Jokowi lakukan dengan PKL menggunakan pendekatan yang sesuai dengan PKL, yaitu pendekatan yang menghargai rakyat kecil.

5. Jokowi sebagai pemimpin yang visioner

Sebagai pemimpin dibutuhkan kemampuan untuk memahami kondisi perencanaan hingga jauh ke depan. Jokowi sebagai pemimpin dianggap mampu memikirkan hal tersebut dengan terobosannya tentang pewarisan kios untuk anak cucu PKL di masa depan, permodalan PKL, serta ide strategis untuk menarik pengunjung ke pasar setelah relokasi. Keterangan yang diberikan Jokowi kepada PKL sebelum relokasi memperlihatkan kemampuannya berpikir ke depan tentang apa yang akan dihadapi oleh PKL nantinya. Pernyataan mengenai relokasi yang diperkirakan akan mengakibatkan pengusuran juga dipatahkan dengan cara pemikirannya yang berbeda. Perencanaan dengan pendekatan yang terintegrasi dan sesuai dengan latar belakang PKL memberikan rasa percaya masyarakat kecil kepada pemerintah sehingga menciptakan proses relokasi yang tidak mengakibatkan efek negatif baik pada pemerintah maupun PKL. Sebaliknya relokasi ini dianggap menguntungkan karena mengembangkan aset ekonomi serta meningkatkan anggaran daerah Pemerintah Kota Solo. Dijelaskan oleh subjek sebagai berikut :

“Pemikiran beliau itu ndak seperti kita jadi Jadi pandangannya itu dia sudah 5 langkah kita baru selangkah. Jadi kalo kita lagi mikir caranya, dia itu sudah tahu jawabannya.” (W1.S2, 24-29)

Kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi mampu memberikan gambaran kepada PKL mengenai masa depan dan apa dihadapi mereka nantinya. Jokowi memberikan gambaran tentang rencana yang sudah ada dan bagaimana cara merealisasikannya. Gambaran ini dijelaskan oleh Jokowi sebelum relokasi, dan membuat PKL yakin dengan negosiasi yang ia lakukan. Dengan pengalaman dan wawasan yang ia miliki, Jokowi menjelaskan secara logis rencana mengenai relokasi PKL dan tujuan didirikan pasar ini serta kemungkinan keuntungan yang dapat diraup oleh PKL setelah relokasi. Perencanaan yang matang mengenai relokasi dan solusi akan permasalahan di masa depan membuat PKL percaya kepada Jokowi dan menyatukan suara untuk relokasi tanpa adanya resistensi.

3. Pembahasan

Secara umum, ada hal penting yang dibutuhkan dalam setiap relokasi baik untuk individu maupun komunitas, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap ketidakpastian yang akan dihadapi dalam situasi yang baru (Sinaga, 2004). Situasi PKL Monumen'45 Banjarsari untuk direlokasi juga memiliki keraguan yang sama karena faktor ketidakpastian yang tinggi. Faktor ini muncul disebabkan kurangnya informasi yang dipaparkan oleh pemerintah mengenai proses relokasi yang akan dilakukan. Kondisi tersebut mendorong pemimpin daerah dan pemerintah untuk mampu mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh PKL. Karena dalam kondisi yang tertekan ada kemungkinan informasi yang diberikan akan ditolak mentah-mentah.

Menurut Baron & Bryne (2005), agar suatu komunitas mampu mengembangkan diri di tempat lain membutuhkan perubahan sikap dan adaptasi yang kuat. Kebutuhan akan adaptasi menjadi hal yang krusial untuk dilakukan PKL sehingga menghasilkan reaksi penolakan untuk berpindah. Salah satu cara yang digunakan pemerintah Solo adalah dengan mengadakan pertemuan yang intens dengan PKL di lokasi yang baru. Evaluasi secara bertingkat dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang muncul di lapangan dan kemajuan yang telah dicapai setelah proses relokasi. Harapan pemerintah melalui pertemuan dapat memberikan pemahaman tentang proses relokasi secara detail kepada PKL. Penanaman akan *self-interest* PKL mengenai relokasi menjadi sebuah titik perubahan yang akan memberikan dampak yang besar. Dalam Sinaga (2004) dijelaskan, bahwa pemberian informasi kepada PKL dibutuhkan daya tarik yang besar. Dari sini PKL akan merasa bahwa perubahan sikap tersebut penting.

Temuan peneliti tentang bagaimana Jokowi mampu *nguwongke* (menghargai) keberadaan PKL selama proses relokasi menjadi salah satu gaya kepemimpinan yang mencakup berbagai aspek. Temuan ini sama dengan studi yang dilakukan oleh Nur (2011) bahwa relokasi PKL di Monumen '45 Banjarsari berlandaskan perlakuan memanusiakan manusia oleh Jokowi. Keberadaan PKL yang dihargai juga menggunakan pendekatan merakyat agar pemimpin dapat membaaur sebelumnya. Hubungan yang didasarkan dengan pembauran antara pemimpin dan masyarakatnya akan menciptakan kepuasan (Aamodt, 2004). Selain itu, karena relokasi merupakan kasus dalam kondisi yang tidak pasti dimana masyarakat beragam dan perkembangan perencanaan pemerintah yang berganti-ganti, pendekatan Jokowi dengan sosial dan budaya merupakan pendekatan yang sesuai karena berlandaskan pendekatan hubungan (interpersonal) antara pemimpin dan PKL. Temuan yang berkaitan dengan basis kepemimpinan yang mementingkan hubungan adalah pola pendekatan kepemimpinan yang

merakyat, *nguwongke* dan *ngemong*. Keputusan Jokowi untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang berladaskan hubungan memperlihatkan keputusan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dalam waktu jangka panjang, seperti diungkapkan dalam temuan peneliti, pemikiran yang visioner menjadi salah satu gaya kepemimpinan Jokowi.

Pendekatan Jokowi dengan dasar konsistensi kebijakan menjadi salah satu temuan peneliti, dengan pespektif kultur Jawa yang diungkap oleh subjek yaitu *sembodo*. Tipikal gaya kepemimpinan *Managerial Grid* dari Blake dan Mouton (1978) mampu diulas dengan adanya konsistensi seorang pemimpin yang fokus pada visi misi pemerintah tetapi juga fokus terhadap anggotanya. Perhatian Jokowi terhadap nasib PKL dan pemikiran yang seimbang untuk PKL ke depannya menjadikan aspek dari gaya kepemimpinan yang mendasarkan atas sikap *ngemong* dan visioner. Hal ini juga diungkap oleh Reddin (1967) dimana pemimpin yang birokrat menitikberatkan kepentingan pemerintah dan rakyat secara seimbang.

Pemimpin yang melakukan perencanaan visinya secara matang mampu mencapai visi dan misinya dengan mudah (Hersey & Blanchard, 2000). Tidak hanya itu, Dinas Pasar sebagai penanggung jawab juga melakukan survey berulang kali ke daerah Monumen '45 Banjarsari untuk melihat situasi dan pengaruh dari sosialisasi tersebut. Aspek Yukl (2010) mengenai kepemimpinan yang memiliki *power-influence* dapat terlihat dalam aplikasi Jokowi dengan berperan penting sebagai pemimpin untuk memperlihatkan pengaruhnya dalam proses relokasi. Ia menempatkan diri tidak sebagai seorang pemimpin melainkan sebagai bagian dari masyarakat PKL untuk memberikan keterbukaan dari PKL dan meningkatkan *self esteem* dalam diri PKL. Ia dan wakilnya mendatangi Monumen '45 Banjarsari pada malam hari dan tanpa kawalan memberikan gambaran keinginannya untuk membaaur sebagai masyarakat biasa. Pemahaman akan pemimpin yang berorientasi pada hubungan dengan memikirkan kondisi bawahannya akan mempermudah pemimpin untuk mengembangkan bawahannya (Robbins, 2005).

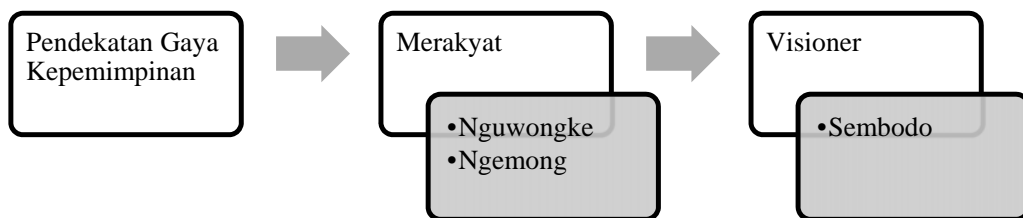
Penley dan Hawkins dalam de Vries (2009) mengungkapkan bahwa pendekatan dalam hubungan akan memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat umum seperti yang dilakukan oleh Jokowi pada tahap pemberian pemahaman di Loji Gandrung, rumah dinas Walikota Solo. Namun begitu, pemberian informasi tidak semudah yang diberikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan pemahaman kognitif dari PKL. Pemberian informasi ini tergantung pada kondisi lingkungan dan kemampuan dari masyarakat sendiri. Tidak semua informasi akan lebih mudah diberikan dengan adanya pendekatan hubungan yang lebih intens (Hersey & Blanchard, 2000).

Secara teoritik, pendekatan gaya kepemimpinan Jokowi lebih ke arah demokratis dimana pemimpin tidak hanya mengarahkan tetapi juga mengembangkan upaya potensial dari masyarakat semaksimal mungkin. Hanya saja, dalam kasus ini Jokowi melakukan pendekatan gaya kepemimpinan dengan basis kultural yang cukup kental jika mengacu pada temuan dari hasil penelitian dengan subjek. Pendekatan yang dilakukan dengan gaya kepemimpinan Jokowi memberikan reaksi yang positif dari PKL. Salah satunya adalah saat mereka dihargai, maka mereka akan balas menghargai pemerintah. Intensitas pertemuan yang berkali-kali juga memberikan rasa dekat dan kepercayaan yang semakin meningkat. Dari kedekatan yang sudah terjalin ini, informasi yang diberikan juga lebih mudah diterima dan

motivasi juga tersampaikan. Paduan dari proses pendekatan ini memberikan keterbukaan dari para PKL untuk melakukan relokasi sesuai dengan perencanaan program.

Setiap fenomena harus dikaji secara kontekstual berdasarkan budaya yang berlaku di sekitar fenomena tersebut (Kim & Park, 2006). Pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi kepada PKL Monumen '45 Banjarsari berupa pendekatan berbasis kearifan lokal. Dari data empiris yang diungkapkan oleh subjek, ditemukan beberapa kata mengungkap nilai kultural Jawa yang berhubungan dengan kepemimpinan seperti *ngemong*, *sembodo*, dan *nguwongke*. Hal ini berarti gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Jokowi dipengaruhi oleh nilai kultural yang berkembang di daerah tersebut (Schein, 2004). Pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari PKL menjadikan basis budaya adalah salah satu pilihan untuk melakukan pendekatan hubungan antara pemimpin dan masyarakat kelas bawah, atau dalam hal ini adalah PKL. Suatu perubahan yang ditujukan kepada masyarakat kecil membutuhkan adaptasi kehidupan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin.

Pola yang dihasilkan dari hubungan antara Jokowi dan PKL dalam proses relokasi dengan gaya kepemimpinan yang memiliki nilai kultural adalah sebagai berikut :



Bagan 3. Pola Pendekatan Gaya Kepemimpinan Jokowi pada PKL

Pola pendekatan gaya kepemimpinan yang mengusankan kepada misi dan visi memperlihatkan adanya strategi dalam meraih tujuan. Strategi tampak dalam perilaku Jokowi dalam melakukan misinya yaitu sikap yang merakyat. Sikap yang merakyat ini relevan dengan kepemimpinan ideal dari Asta Brata yang sesuai dengan sifat Batara Indra atau elemen langit yang artinya sebagai seorang pemimpin hendaknya mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya. Dalam aplikasinya, Jokowi *ngemong* PKL selama proses relokasi dengan memperkirakan kebutuhan PKL dan memperkirakan pendapatan yang akan mereka dapatkan setelah direlokasi. Jokowi dengan implementasi dari elemen langit mencoba untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk relokasi dengan melakukan kirab sehingga PKL merasa senang. Kirab yang biasanya hanya dilakukan untuk bangsawan Kasunanan diberlakukan untuk PKL menjadi hal yang membuat PKL merasa senang dan di-*uwongke*. Selain itu, sikap merakyat juga menjadi satu implementasi dari sifat Batara Bayu atau elemen angin dimana seorang pemimpin mampu masuk ke dalam komunitas apapun dari arah manapun dan membaur dengannya. Hal ini juga yang menjadikan PKL merasa bahwa Jokowi *nguwongke*. Seperti Batara Brama yang berarti api, Jokowi tidak membedakan PKL dengan golongan manapun dan memberikan arahan kepada PKL untuk dapat direlokasi.

Adanya dasar kultural Jawa yang mendasari gaya kepemimpinan Jokowi dianggap tepat dan sesuai dengan komunitas masyarakat yang ia hadapi. Hal ini sesuai dengan hasil

studi yang diungkap oleh Zagoršek (2004) bahwa dalam kepemimpinan, nilai kultur menjadi hal yang signifikan untuk acuan. Permasalahan relokasi PKL liar yang terjadi di penjuruk daerah di Indonesia, dengan pendekatan berbasis kearifan lokal seperti yang dilakukan oleh Jokowi mampu menumbuhkan rasa percaya, dihargai, senang, dan PKL menjadi dekat dengan pemimpin. Hal ini sesuai dengan studi dari House, Wright & Aditya (1997) yang mengatakan perubahan sosial akan lebih mudah dilakukan pemimpin dengan pendekatan secara kultural.

Selain itu, PKL juga termotivasi untuk melakukan relokasi karena pemimpin yang menjadi tauladan mereka. Factor-faktor yang diungkap oleh PKL ini memberikan keterbukaan PKL dalam melakukan relokasi seperti pengajuan syarat dan kebutuhan setelah relokasi. Hal ini juga disambut oleh pemerintah dan Jokowi sebagai pemimpin untuk memperlihatkan komitmen mereka, dan pada akhirnya relokasi dapat dilakukan tanpa mengakibatkan resistensi yang berarti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini akan mengungkap gaya kepemimpinan yang efektif untuk melakukan relokasi pada Pedagang Kaki Lima dengan latar belakang seperti PKL di Monumen '45 Banjarsari, Surakarta. Berikut adalah hasil kesimpulan yang telah dirangkum :

1. Pola gaya kepemimpinan yang digunakan Jokowi pada program relokasi Pedagang Kaki Lima di Monumen '45 Banjarsari adalah :
 - a. Gaya kepemimpinan merakyat. Dalam hal ini Jokowi menempatkan diri sebagai pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakatnya.
 - b. Gaya kepemimpinan *nguwongke*. Dalam hal ini Jokowi menempatkan diri sebagai pemimpin yang menghargai masyarakatnya baik secara individu maupun komunitas.
 - c. Gaya kepemimpinan *sembodo*. Dalam hal ini Jokowi konsekuen dalam menjaga komitmen yang telah diutarakan.
 - d. Gaya kepemimpinan *ngemong*. Dalam hal ini Jokowi memberi perhatian, mengayomi dan melindungi warga masyarakatnya.
 - e. Gaya kepemimpinan visioner. Dalam hal ini Jokowi mampu membuat rencana dan memperkirakan resiko baik dan buruk di masa depan.
2. Jokowi melakukan pendekatan kepada PKL dengan pola gaya kepemimpinan yang melihat kepada aspek psikologis yang memberikan rasa aman (*security*) dan meningkatkan *self esteem* PKL.

B. Saran

Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya
Penelitian ini masih tergolong baru mengenai gaya kepemimpinan Jokowi. Sehingga diharapkan melalui penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi aspek-aspek psikologis tentang kepemimpinan seperti konsistensi gaya kepemimpinan, manajemen pemerintahan, strategi kepemimpinan, dan sebagainya.
2. Praktisi Psikologis
Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk model pelatihan bagi calon pemimpin daerah dengan pola gaya kepemimpinan yang berbasis pada kearifan lokal. Kemampuan pemimpin yang berbasis kearifan lokal ternyata efektif untuk perubahan sosial.
3. Pemimpin daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para pemimpin daerah dalam melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima di daerahnya yang memiliki latar belakang yang kurang lebih hampir mirip dengan Pedagang Kaki Lima di Monumen '45 Banjarsari. Gaya kepemimpinan yang diaplikasikan oleh Jokowi dalam proses ini memberikan dorongan tersendiri kepada para PKL untuk melakukan relokasi tanpa resisten. Dalam hal ini, pemimpin daerah dapat mengambil keuntungan dalam penghematan dana penggusuran karena pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan hal-hal yang bersifat psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aamodt, M. G. (2004). *Applied Industrial/Organizational Psychology, 4th Edition*. California: Thomson Wadsworth.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ariyadi, E. W., Adishakti, L. T., & Kristiadi, D. (2005). Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Pedagang Kaki Lima Pada Suatu Kawasan : Studi Kasus Kawasan Monumen Perjuangan 45 Banjarsari Surakarta. *Manusia dan Lingkungan* , 12 (3), 140-149.
- Baron, R., & Byrne, D. (2005). *Social Psychology (10th Edition)*. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.
- Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1978). *The Managerial Grid* . Texas: Gulf Publishing.
- De Vries, R. E., & Bakker-Pieper, A. (2010). Leadership = Communication? The Relations of Leaders Communication Styles with Leadership Styles, Knowledge Sharing and Leadership Outcomes. *J Bus Psychol* , 25, 367-380.
- Drucker, P. F. (2007). *The Practice of Management*. New York: Butterworth-Heinemann.
- Febrihanawati, A. I. (2010). Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Fosterharoldas, D. (2004). Management of City Publik Space: Empirical Study of Cities in Indonesia and Other Countries, Urban Design International Seminar: Managing Conflicts in Public Spaces Through Urban Design. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (2000). *Management of Organizational Behavior* . California: Prentice-Hall, Inc.
- House, R. J., Wright, N. S., & Aditya, R. N. (1997). Cross-Cultural Research on Organizational Leadership: A Critical Analysis and Proposed Theory. Dalam C. P. Earley, & M. Erez, *New Perspective on International Industrial/Organization Psychology* (hal. 535-625). San Fransisco: The New Lexington Press.
- Kim, U., & Park, S.-Y. (2006). Indigenou Psychological Analysis Of Academic Achievement In Korea: The Influence Of Self-Efficacy, Parents, And Culture. *International Journal Of Psychology* , 287–292.
- Lawrence, N. W. (2007). *Basics of Social Research 2nd Edition*. Boston: Pearson Education.
- Nur, F. T. (2011). Komunikasi Politik Dalam Relokasi PKL. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Peters, H., & Kabacoff, R. (2010). *Global or Local: The Impact of Country Culture on Leadership Style in Europe*. Management Research Group.

- Poerwandari, Kristi. (2007). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3 UI.
- Reddin, W. J. (1967). The 3-D Management Style Theory. *Training and Development Journal* , 8-17.
- Riggio, R. (2003). *Introduction to Industrial/Organizational Psychology 4th Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Robbins, S. P. (2007). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Sarantakos, S. (2005). *Social Research 3rd Edition*. New York: Palgrave Mac Millan.
- Schein, E. (2004). *Organizational Culture and Leadership*. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Sinaga, S. (2004). Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Binaan. *Tesis* (tidak Diterbitkan). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Steinberg, B. S. (2005). Indira Gandhi : The Relationship Between Personality Profile and Leadership Style. *Political Psychology* , 26 (5), 755-789.
- Sutomo, Y. (2005, Juli). *www.liputan6.com*. Diakses 15 Oktober 2011, dari Liputan 6: <http://berita.liputan6.com/read/107596/penertiban-pkl-pasarminggu-berakhir-ricuh>.
- Timpe, A. D. (1991). *Seri Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis : Kepemimpinan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yukl, G. (2002). *Leadership in Organization (5th Edition)*. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc.
- Yukl, G. (2010). *Leadership in Organization (7th Edition)*. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc.
- Zagoršek, H. (2004). Assessing The Impact of National Culture on Leadership : A Six Nation Study. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Slovenia, Ljubljana : University of Ljubljana.